

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pengelolaan Dana Desa ini adalah Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

B. Jenis Penelitian

Dilihat dari objek, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini berusaha memberi gambaran tentang suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Mengacu pada pendapat Ulum (2016 : 28) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan hanya untuk memberi penjelasan tentang sesuatu yang diteliti dan tidak melibatkan hubungan atau membandingkan objek.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa

di Desa Sengguruh diantaranya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kabid.Pembangunan dan masyarakat desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian Pemerintahan Desa Sengguruh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat, valid dan up-to-date peneliti akan melakukan:

1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data primer serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan. Wawancara yang dilakukan menggunakan *tape recorder* (alat perekam suara). Alat perekam suara diperlukan sebagai bahan *cross-check* peneliti, jika saat analisa terdapat data, keterangan dan informasi yang belum sempat tercatat oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan yakni berupa dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, dokumen penatausahaan, dokumen pelaporan dan dokumen pertanggungjawaban.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis kesesuaian pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan pengelolaan dana desa di desa Sengguruh kecamatan Kepanjen kabupaten Malang:

a) Perencanaan

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b) Pelaksanaan

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c) Penatausahaan

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

e) Pertanggungjawaban

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Anggaran berkenaan dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 pasal 40:

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

2. Menyimpulkan hasil analisis pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014